PEBANDINGAN MAHKAMAH KONSTITUSI; NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA REPUBLIK CHILI¹

Oleh : P A T A W A R I

Dosen Fakultas Hukum UIT

Email: patawari.mh@gmail.com

Abstrak

Perbandingan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Republik Chili tujuannya adalah untuk membandingkan Mahkamah Konstitusi dimasing-masing negara.

Pada dasarnya Indonesia dan Chili adalah masing-masing sebagai negara Republik, dan mempunyai konstitusi sebagai dasar dalam negara. Namun demikian dalam Mahkamah Konstitusi mereka mempunyai perbedaan dan kesamaan yaitu;

Kesamaan, dalam hal Konstitusional review masing-masing negara Indonesia-Chili memiliki kewenangan Konstitusional review dalam permasalahan pengujian Undang-Undang yang dianggap inkonstitusional.

Perbedaan, Perbedaan yang sangat signifikan terletak pada kewenangan Mahkamah Konstitusi negara Chili yang hanya bisa melakukan pengujian terhadap perjanjian internasional yang belum diratifikasi atau Rancangan undang-undang (RUU) sebelum disahkan menjadi Undang-undang

Kata Kunci: *Perbandingan, Mahkamah Konstitusi, Indonesia, Chili*

¹ Terbit di LPPM UIT Makassar 2012

PENDAHULUAN

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945²

² Lihat di : <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Profil.SejarahMK>

Penafsiran Konstitusi dapat dilakukan oleh siapa pun, tidak terkecuali warganegara secara individu. Setiap lembaga negara memiliki otoritas untuk melakukan penafsiran konstitusi dengan ruang lingkup kewenangan yang dimilikinya, kedudukan lembaga negara adalah equal dan hal lain membuat penafsiran yang dilakukan oleh suatu lembaga negara hanya mengikat ke lembaga itu sendiri.

Penafsiran yang dilakukan oleh badan peradilan berbeda, karena kekuasaan yudisial yang melekat dengannya membuat penafsiran tentang Konstitusi yang dituangkan dalam bentuk putusan yang memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian badan yudisial, dalam hal ini badan peradilan, diberi wewenang untuk mengawal dan menafsirkan Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat khusus dan eksklusif yang akan menimbulkan dampak/efek kedepannya. Lembaga ini khusus dibentuk dan terletak di luar badan peradilan biasa yang sepenuhnya independent dari cabang lain dari otoritas publik.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk melindungi Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga arbitrase final antara pemerintah dengan warga negara dalam pelanggaran hak konstitusi. Mahkamah Konstitusi mereview semua produk legislatif yang merupakan instrumen hukum tertentu yang spesifik di lingkungan hukum dan politik.

Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan Konstitusi tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak. Untuk itu dapat diadakan organ khusus seperti pengadilan khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi *constitutional court*, atau kontrol terhadap konstitusionalitas undang-undang *judicial review* diberikan kepada pengadilan biasa, khususnya Mahkamah Agung seperti di Amerika Serikat. Organ khusus yang mengontrol tersebut dapat

menghapuskan secara keseluruhan undang-undang yang tidak Konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain ³

George Jellinek pada akhir abad ke -19 mengembangkan gagasan agar kewenangan Judicial Review tersebut ditetapkan di Austria, seperti yang telah ditetapkan oleh John Marshal Di Amerika pada tahun 1867, Mahkamah Agung Austria mendapatkan kewenangan mengenai sengketa yuridis terkait dengan perlindungan hak-hak politik berhadapan dengan pemerintah. Pemikiran Kelsen yang telah diungkapkan di atas, mendorong terbentuknya suatu lembaga yang diberi nama "*Vesfassungsgerichtshoft*" atau Mahkamah Konstitusi (Constitutioanal Court) yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga model ini sering disebut sebagai "The Kelsenian Mode" ⁴

Gagasan ini diajukan ketika Kelsen diangkat sebagai anggota lembaga pembaharu Konstitusi Austria (Chacelery) Pada Tahun 1919-1920 dan diterima dalam Konstitusi tahun 1920. Ini lah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia. Model ini menyangkut hubungan antara prinsip supremasi Konstitusi *the principle of the supremacy of the parliament*. Mahkamah Knstitusi ini melakukan pengujian baik terhadap norma-norma yang bersifat abstrak *abstract review* dan juga memungkinkan pengujian terhadap norma kongkrit *concrete review*, pengujian biasanya dilakukan secara a posteriori, meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan pengujian "a priori" ⁵

Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri terpisah dari Mahkamah Agung atau

³ Hans kalsen, general theory of law and state, translated By. Anders wedberg (new York: Russell & Russell, 1961. Hal 157

⁴ Disebut juga dengan *the centralized system of judicial review*" Lihat Arend liphart patters of democracy; goverment forms an performance in thirty-six coutries. (new heaven an london: yale university Press, 1999), hal 225

⁵ Jimly asshiddiqie, model-model pengujian konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta Konstitusi press, 2005), hal 28, 29, 54-66, 108 dan 109. Terhadap peran Kalsen dalam hal ini masih ada perbedaan pandangan antara mana yang lebih penting peranannya antara Georg Jellinek dan Adolf Merkl atau hans Kalsen. Lihat en Not nagian pertama halaman 51 No. 32

dilekatkan menjadi bagian dan fungsi Mahkamah Agung. Namun, jika berdiri sendiri, Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Sebagian besar negara demokrasi yang sudah meyan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Sampai sekarang baru ada 78 negara yang membentuk Mahkamah ini secara sendiri ⁶

Fungsinya biasanya dicakup dalam fungsi *supreme court* yang ada di setiap negara. Salah satu contohnya ialah Amerika Serikat. Fungsi-fungsi yang dapat dibayangkan sebagai fungsi Mahkamah Konstitusional seperti *Judicial review* dalam rangka menguji konstitusionalitas suatu undang-undang baik dalam arti formil ataupun dalam arti pengujian materil, dikaitkan langsung dengan kewenangan Mahkamah Agung (Supreme court)⁷

Mahkamah Agung *Supreme court* atau mungkin diberikan pada lembaga independen di luar cabang kekuasaan yudisiil. Konstitusional review diadopsi dan diperkenalkan dalam keadaan yang berbeda, tergantung sistem ketatanegaraan masing-masing negara.

Konstitusi *judicial review* memiliki beraneka ragam model dan varian keanekaragaman tersebut dilihat dari fungsi sebagai “penjaga Konstitusi” itu diberikan kepada lembaga khusus yang Mahkamah Konstitusi *constitutional court* atau dilekatkan pada lembaga peradilan biasa yang telah ada.

Mahkamah Konstitusi memiliki beraneka ragam model dan varian. Adapun faktor perbedaan yang menjadi varian dalam keanekaragaman model dan varian bentuk suatu Mahkamah Konstitusi antara lain;

- a. *Kelembagaan institusi*, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai organisasi yang memiliki fungsi sebagai penjaga Konstitusi. Sebagai suatu organisasi

⁶ Indonesia merupakan negara ke-78 yang negara dapat dibaca dalam Jimly Asshishiqie dan Mustafa Fakhri, Mahkamah konstitusi, kompilasi ketentuan konstitusi, undang undang dan peraturan di 78 negara, Jakarta Pusat studi Hukum an Hukum Administrasi Negara Indonesia.

⁷ Pembahasan secara komprehensif mengenai pengujian konstitusional dapat di baca dala Jimly Assiddiqie *Model-Model pengujian konstitusional di berbagai negara*, Jakarta Konstitusi Press. 2005

tentu saja sebagai memiliki struktur organisasi dalam melaksanakan tupoksi organisasi tersebut. Sistem tertentu dapat diklasifikasikan dengan model yang umum struktur Mahkamah Konstitusional berdasarkan komponen berikut:

Pertama, Komposisi Hakim yaitu a). Jumlah Hakim bahwa Pemilihan pengangkatan, adalah sistem yang berlaku dalam pengajuan dan pengangkatan hakim Konstitusi, serta penetapan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan calon Hakim Konstitusi.

Kedua, Masa jabatan hakim Konstitusi, apakah ada perbedaan antara ketua Mahkamah Konstitusi dengan anggota Mahkamah Konstitusi atau tidak.

Ketiga, Persyaratan yang diperlukan hakim Konstitusi, dalam hal ini juga kemungkinan adanya variabel. Yaitu persyaratan hakim Konstitusi yang diajukan oleh masing-masing pihak memiliki persyaratan khusus atau persyaratan dan pihak-pihak tersebut sama. Tidak ada syarat tambahan atau syarat khusus.

Keempat, Kekekalan, hal ini sehubungan jabatannya sehingga sebagai hakim Konstitusi dan status jabatannya tersebut dalam Konstitusi

- b. *Persidangan*, pada umumnya adalah sidang pleno dengan menetapkan kuorum hakim Konstitusi dalam setiap sidang. Selain itu, mengatur pula tentang hukum acara tersendiri mulai dari pendaftaran berkas sampai putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi biasanya diambil berdasarkan pemufakatan dengan berdasarkan *dissenting/concurring opinion*.
- c. *Organisasi* dalam hal ini, ditinjau dari struktur organisasinya suatu organisasi memiliki sekretaris yang menjalankan otonomi administrasi, menyusun dan melaksanakan anggaran melakukan pelayanan

administrasi serta pelayanan khusus. Tentu saja semua ini tidak dilakukan oleh hakim Konstitusi melainkan staf di Mahkamah Konstitusi.

- d. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi* dalam Konstitusi, sebagai organ utama atau organ tambahan, serta kedudukannya dengan lembaga negara yang lain, apakah *equal* atau tidak.

Sifat dan prinsip Mahkamah, hal ini merupakan dampak dari kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Model pranata judicial constitutional review mempengaruhi sifat putusan dan dampak yang timbul akibat putusan tersebut. Adapun sifat dan prinsip Mahkamah memiliki varian yang beragam, antara yaitu a) Finalitas b) Kekuatan mengikat, dalam hal ini terdapat 2 (dua) macam yaitu ; erga omnes dan inter partes. c) Ex officio. d) Pembatalan seluruhnya atau sebagian. e) Konsekuensi putusan dan ganti rugi f) Bentuk lain putusan.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi harus mempublikasikan setiap putusannya melalui berita resmi, jurnal hukum, media elektronik atau bentuk lainnya.

- e. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi* yaitu *Pertama*, Kewenangan inti, yaitu *constitutional review* baik *preventif* maupun *a posteriori review*.

Kedua, Kewenangan lain, pengaduan Konstitusional, sengketa pemilihan umum, sengketa antar lembaga atau partai politik atau lainnya yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diserikan oleh Konstitusi.

Chili, adalah sebuah negara di Amerika Serikat yang sering mengalami konflik internal menyangkut permasalahan politik dan sosial. Namun Chili memiliki sistem peradilan terbaik di Amerika Latin.⁸ .

⁸ Chili dengan Konstitusi 1925 telah memperkenalkan reformasi yang diarahkan pada depolitisasi dan pengembangan dari sistem peradilan yang memberikan jaminan terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Namun, pada Konstitusi 1980 Pengadilan menjadi alat politik dalam proses pemerintahan junta militer jenderal Augusto Pinochet, sehingga dengan alasan konstitusi 1980 tidak

Bentuk negara Chili adalah kesatuan, yang terdiri dari 13 (tiga belas) daerah, dengan 40 (empat puluh) propinsi yang dipimpin oleh Gubernur yang ditunjuk oleh President Chili menganut sistem desentralisasi dan merupakan Negara yang menganut sistem Presidentsial dengan multi –partai.

Beberapa kondisi yang memiliki kesamaan dengan Indonesia pada “perbandingan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Chili” pembahasan tersebut di batasi dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana model dan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.?
2. Bagaimana model dan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Chili ?

II. Pembahasan

1. Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan Indonesia, muncul pada abad ke-20 ini. Ide tersebut di adopsi pada amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001. Mahkamah Konstitusi Indonesi, ditinjau dari aspek –aspek berikut ini;

- a. *Kelembagaan*, yaitu Fungsi penjaga Konstitusi diberikan kepada lembaga khusus di luar badan peradilan biasa dan idependent tetapi masih termasuk dalam badang cabang kekuasaan yudisiil yang diwujudkan

Mencerminkan semangat demokrasi karena konstitusi 1980 dibuat pada masa pemerintahan Junta Militer di republi Chili.

dalam suatu bentuk Mahkamah . yaitu Mahkamah Konstitusi kelembagaan.⁹

- b. *Komposisi Hakim*, dengan ketentuan 1) Jumlah hakim ; 9 (sembilan) orang 2) Pemilihan/pegangkatan 3) 3 orang ditunjuk oleh Mahkamah Agung 4) 3 orang diajukan oleh DPR 5) 3 orang di ajukan oleh President 6) Tidak ada perbedaan/diskriminasi, persyaratan yang tercantum pada Pasal 16 UU Nomor 24 Tahun 2003 berlaku untuk semua calon yang diajukan baik itu hakim ataupun praktisi hukum. 7) Konfigurasi sumber rekrutmen hakim Konstitusi dan tiga cabang kekuasaan negara tersebut mencerminkan keseimbangan dan keterwakilan tiga cabang kekuasaan negara (trias Pilitika) yaitu legislatif, eksekutif fan yudikatif.¹⁰ 8) Masa jabatan 5 (lima) tahun
- c. *Persidangan Mahkamah Konstitusi*, yaitu memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam sebuah sidang pleno. Mahkamah Konstitusi 9 (sembilan) orang hakim Konstitusi, kecuali alam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) hakim Konstitusi. Adapun keadaan biasa ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- d. *Organisasi*, Mahkamah Konstitusi, diluar hakim Konstitusi memiliki sekretariat dan kepaniteraan yan mejalankan otonomi administrasi anggaran, layanan administrasi, layanan khusus seperti pusat informasi hukum perpustakaan hukum dan penasehat hukum.

⁹ Mahkamah Konstitusi mulia terbentuk pada tahun 2003 dengan disahkannya Undang Undang Nomor 24 tahun 2003. Yang diganti dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁰ Di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Mahkamah Konstitusi dan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang meperkuat sistem *chack an balance* antara cabang kekuasaan negara.

- e. *Kedudukan*, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan
- f. *Sifat prinsip Mahkamah*, Putusan pendapat Mahkamah adalah final, Hal ini berkaitan dengan fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan untuk menafsirkan UUD 1945 dan memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap UUD 1945
- g. *Kewenangan* Mahkamah Konstitusi Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir pada putusannya yang bersifat final untuk :
 - 1. Menguji Undang Undang terhadap UUD NRI 1945
 - 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.
 - 3. Memutus pembubaran Partai Politik dan
 - 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Berdasarkan 4(empat) wewenang dan 2 (satu) kewajiban yang dimiliki tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga Konstitusi (*the guardian of the constitution*). Hal tersebut sesuai dengan dasar keberadaannya untuk menjaga pelaksanaan konstitusi.¹¹

Selain dari itu, Mahkamah Konstitusi adalah menjamin terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dan juga, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengawal demokrasi *the guardian of the democracy by protecting minority right*, perlindungan hak Konstitusional

¹¹ Fungsi Mahkamah Konstitusi Fungsi tersebut membawa konsekuensi untuk menjaga pelaksanaan Konstitusi juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai penafsir Konstitusi yang bersifat final (*the final interpreter of the constitution*)

warganegara *the protector of the citizen's constitutional rights*, dan perlindungan hak asasi manusia *the protector of human rights*¹²

2. Mahkamah Konstitusi di Republik Chili

Hukum Romawi dan Spanyol, juga dari tradisi Prancis, khususnya kode Napoleon, merupakan hukum yang menginspirasi dari pada lahirnya sistem hukum peradilan di negara Republik Chili¹³.

Berdasarkan Konstitusi Chili Tahun 1980, Mahkamah Konstitusi Chili memiliki karakteristik sebagai berikut;

a. *Kelembagaan*, yaitu Konstitusi 1980, kelembagaan Mahkamah Konstitusi mulai terbentuk Mahkamah Konstitusi Chili sebagai kelembagaan dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu

Pertama, Komposisi Hakim yaitu a) Jumlah hakim adalah 7 (tujuh) orang. b) 3 (tiga) hakim dipilih dari Mahkamah Agung berdasarkan suara terbanyak. c) 1 (satu) praktisi hukum ditunjuk oleh President. d) 2 (dua) praktisi hukum ditunjuk Dewan Keamanan Nasional. e) 1 (satu) praktisi hukum ditunjuk oleh Senat.

Kedua, Sedangkan syarat untuk praktisi hukum dimaksudkan adalah : a) Memiliki kerja yang sangat baik di dalam universitas ataupun suatu kegiatan umum. b) Tidak memiliki halangan yang menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya selaku Konstitusi. c) Syarat tambahan untuk praktisi hukum yang diusulkan oleh President dan Senat adalah sebelumnya pernah aktif di dalam MA (bukan sebagai hakim) sedikitnya dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut. d) Masa jabatan 8 Tahun

¹² Assiddiqie, Jimly Gagasan dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Hal. 24

¹³ Konstitusi negara Republik Chili adalah ditetapkan pada tahun 1980. Lihat www.chili.go.cl

Sama halnya dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia Mahkamah Konstitusi Chili juga memiliki sekretariat dan kepaniteraan yang menjalankan otonomi administrasi, anggaran, layanan administrasi layanan khusus seperti pusat informasi hukum, perpustakaan hukum dan penasihat hukum.

- b. *Persidangan*, Setiap sesi persidangan yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi harus memenuhi kuorum sedikitnya 5 (lima) hakim Konstitusi dan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak diajukan banding.
- c. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi* Indonesia merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Adalah sama dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi di negara Republik Chili,
- d. Sifat dan prinsip Mahkamah Segala bentuk Putusan harus dipublikasikan melalui berita resmi. Dan segala bentuk Putusan apapun atau pendapat Mahkamah adalah final, tidak dapat diganggu gugat dan mengikat semua lembaga.
- e. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Chili lebih banyak dari pada Mahkamah Konstitusi Indonesia, adapun kewenangannya (Pasal 82 Konstitusi 1980) antara lain;
 - 1. Melakukan pengawasan agar pembuatan Undang Undang yang dibuat oleh kongres tidak bertentangan dengan Konstitusi.
 - 2. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan Konstitusi di dalam pembuatan suatu Undang Undang ataupun di dalam proses amandemen UUD dan juga menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konstitusi atas segala perjanjian internasional yang perlu persetujuan oleh kongres.

3. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan Konstitusi di dalam segala penetapan atau pun putusan yang memiliki kekuatan hukum
4. Menyelesaikan sengketa pemilihan umum, sehubungan dengan putusan yang telah dikeluarkan oleh *Elections qualifying court*
5. memutuskan tuntutan yang timbul apabila President tidak mengeluarkan suatu peraturan dimana seharusnya peraturan tersebut dikeluarkan atau apabila President mengeluarkan suatu peraturan yang bertentangan dengan Konstitusi.
6. Memutuskan (apabila diminta oleh President) mengenai persesuaian dengan Pasal 88 Konstitusi 1980 tentang suatu putusan yang dikeluarkan oleh President tentang anggaran Negara yang dinyatakan oleh *comptroller general* bertentangan dengan Konstitusi.
7. Menyatakan apabila suatu organisasi, pergerakan atau partai politik dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi sesuai dengan Pasal 8 Konstitusi Chili yaitu organisasi, pergerakan atau partai politik yang melakukan pengaduan politik, melakukan tindakan kekerasan sehingga harus dibubarkan .
8. Menyatakan apabila seseorang dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang bertentangan dengan perintah yang dikeluarkan oleh negara, apabila orang tersebut adalah President Republik Chili, maka akan dibutuhkan persetujuan dari Senat
9. Memberikan laporan kepada senat sehubungan dengan kasus yang sedang ditangani oleh *chambers of deputies* mengenai dugaan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah.
10. Menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan Konstitusi sehubungan dengan larangan bagi seseorang untuk ditunjuk sebagai Menteri Negara, ataupun apakah seorang menteri Negara

masih dapat menduduki jabatannya, serta dapat atau tidaknya Menteri Negara menjalankan fungsi di luar fungsi yang dimilikinya secara serentak atau berbarengan.

11. Menetapkan mengenai ketidak mampuan dan atau tidak lagi memenuhi syarat serta alasan diberhentikanannya anggota kongres;
12. Memutuskan bertentangan atau tidaknya putusan tertinggi yang dikeluarkan oleh President sehubungan dengan kewenangannya, dimana putusan tersebut dikeluarkan berdasarkan amanah dari Konstitusi.¹⁴

Mahkamah Konstitusi Chili hanya bisa melakukan pengujian dari Rancangan undang Undang (RUU) sebelum disahkan menjadi undang Undang (UU) dan perjanjian Internasional sebelum diratifikasi atau RUU sebelum disahkan menjadi UU maka hak pengujian tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Mahkamah Agung.

Terkait dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 18 April 2002 telah membuat putusan yang kontroversial, yaitu dalam perkara “landmark case”. Mahkamah Konstitusi memutuskan perjanjian internasional mengenai Roma adalah inKonstitusional . pada hal perjanjian Internasional tersebut telah di ratifikasi oleh *Chambers of deputies* pada tanggal 22 januari 2002.

Mahkamah Konstitusi menyatakan inKonstitusional statuta Roma yang telah di ratifikasi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berdasarkan Konstitusi, kedaulatan terletak pada negara. Yuridiksi dari ICC tidak bersifat atau berfungsi melengkapi dari peradilan Chili akan tetapi sifat dan fungsinya adalah substitusi dari peradilan Chili. Permohonan

¹⁴ Sumber : Constitutional of Chile 1980

tersebut diajukan oleh oposisi sayap kanan yang tidak menginginkan Pinochet diadili di ICC.

Hal ini dikarenakan tidak berselang lama dari ratifikasi tersebut, Pinochet ditangkap di London dan diadili oleh ICC. Terlepas dari alasan tersebut, yang menjadi kontroversi adalah berdasarkan Konstitusi 1980, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu perjanjian internasional adalah inKonstitusional apabila perjanjian internasional tersebut belum diratifikasi. Sedangkan statuta roma yang dinyatakan inKonstitusional tersebut, telah diratifikasi oleh *chambers of deputies*. Seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam masalah ini dan hanya berwenang adalah Mahkamah Agung.

Peradilan Chili, sepanjang sejarahnya, sangat jarang dan memisahkan antara permasalahan politik dan Konstitusional. Ini pulalah yang menyebabkan perlunya amandemen Konstitusi 1980.

III. Kesimpulan

Terdapat kesamaan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Republik Chili dalam hal Konstitusional review, bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kewenangan Konstitusional review dalam permasalahan pengujian Undang Undang yang dianggap inkonstitusional. Demikian juga dengan negara Republik Chili.

Perbedaan yang sangat signifikan terletak pada kewenangan Mahkamah Konstitusi negara Chili yang hanya bisa melakukan pengujian terhadap perjanjian internasional yang belum di ratifikasi atau Rancangan undang undang (RUU) sebelum disahkan menjadi Undang undang (UU).

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly *Konstitusi & Konstitusionalisme indonesia* edisi revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- _____ *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai negara*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005
- _____ *hukum acara pengujian Undang-Undang*. Jakarta Konstitusi Press. 2006
- Kelsen, Hans *general Theory of law an state, translated by; Anders Wedberg*. New York :Russell & Russel, 1961
- Lijphart, Arend *Patterns of Democracy; government Forms and Performance in Thirty-six countries*. New Haven and London: Yale University Press. 1999

Makalah

- Asshiddiqi, Jimly *gagasan dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta; Konstitusi Press
- _____ *Mahkamah Konstitusi dan sistem ketatanegaraan republik Indonesia*. Jakarta: konstitusi Press
- Haberle, Peter, *Role and Impact of constitutional courts in a comparative perspective*, Bayreuth.

Regulasi

- Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Constitutional of Chile 1980